PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

NAUFAL RIZQULLAH ATMODJO – 21112268

Pembimbing

Angky Febriansyah, SE.,M.M

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017
Email : naufalrizqullahatmodjo@gmail.com

ABSTRACT

Capital expenditure is influenced by several factors, among them the Local Taxes and the General Allocation Fund. There is a phenomenon indicates ON Year 2013-2015 The Regional Tax and the General Allocation Fund Capital Spending Up but Down. Singer study aims to review to find out how big the influence of Local Taxes and the General Allocation Fund Against Capital Expenditure ON District and City in the province of West Java.

Methods used hearts singer research is descriptive method, verification WITH quantitative approach. The method used is multiple linear analysis method. Also previously conducted trials Classical assumptions, including normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test processed WITH SPSS v19 software.

The results showed that there was no violation of normal indicating that the data has been able to use multiple linear analysis method. The results of this study indicate that 60.71% Local Tax effect on Capital Expenditure. Likewise, the General Allocation Fund 2.74% effect on Capital Expenditure.

Keywords: **Local Taxes, General Allocation Fund, Capital Expenditure**

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk dapat menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai dasar modal pembiayaan dan penyelenggaran pemerintah di daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir saat ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya hal tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Hal ini baik untuk perkembangan pembangunan di Indonesia, yang tentunya juga dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan dan jaminan hidup bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dalam organisasi sektor publik adalah pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah

Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal (Kawedar,Warsito, Rohman dan Handayani, 2008).

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008).

Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Salah satu upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Kusufi, 2012:107).

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Menurut Suparmoko (2002:55) pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Tuntutan penerimaan pajak daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai dengan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerahan dalam jumlah besar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda tergantung kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2009).

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Definisi lain menyebutkan Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.(Bastian ,2003:84)

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat kenaikan Pajak Daerah pada Kabupaten Bogor tahun 2013-2015, tetapi pada tahun tersebut Belanja Modal mengalami penurunan.
2. Terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Bogor tahun 2013-2015, tetapi pada tahun tersebut Belanja Modal mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
   Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dalam hal pengembangan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian Belanja Modal sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengoptimalkan Belanja Modal dengan baik.
3. Bagi Pihak Lain
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahkan sebagai referensi dan rujukan bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

1.5.2 Kegunaan Akademis.

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi serta pengetahuan dan referensi tentang pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
   Menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Matriot Pahala Siahaan (2013:9):

"Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2.1.1.1 Indikator Pajak Daerah

Dalam Marihot Pahala Siahaan (2013:9) menjelaskan Pajak Daerah meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.2 Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2012:56) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

> "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

2.1.2.1 Indikator Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2012:33) pengertian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

> "Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah"

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, APBD adalah suatu rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

2.1.3 Definisi Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah :

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan".

Menurut Mursyidi (2013: 305) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi".

2.1.3.1 Indikator Belanja Modal

Adapun jenis-jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pegaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, salah satunya pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Agave Sianturi (2010) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Menurut Sugianto (2011:28) menyatakan bahwa :

"Hasil pungutan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah".

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Menurut Saragih (2006:6) menyatakan bahwa :

"Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal"

Hubungan positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut

Ni Luh Dina Selvia Martini (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Yudi Satrya Aprizay, dkk. (2014) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hı : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

III Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang diperlukan untuk menentukkan variabel yang dapat dioperasionalisasikan atau diukur dengan menggunakan jenis, indikator, serta skala dari variabel yang terkait dalam penelitian.

Untuk itu variabel yang akan dikaji adalah pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, dimana variabel-variabel yang terkait dalam peneilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas *(Independent)*
   Variabel bebas *(Independent)* pada penelitian ini adalah Pajak Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2). Dalam operasionalisasinya semua variabel diukur oleh instrument pengukuran dalam bentuk rasio.
2. Variabel Terikat *(Dependent)*
   Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Belanja Modal (Y).

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data-data yang digunakan diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dan sudah dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi sifatnya melengkapi, membantu, dan menambah informasi untuk bahan penelitian. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini di antaranya kajian literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal, dan internet.

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3.2 Tehnik Pengiumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan
   Jonathan Sawarno (2006:82) menjelaskan bahwa studi lapangan merupakan desain penelitian yang mengkombinasikan antara pencarian survei berdasarkan pengalaman dan atau studi kasus dimana peneliti berusaha mengidentifikasi variabel-variabel penting dan hubungan antar variabel tersebut dalam situasi permasalahan tertentu. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tersedia dari Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahunan, Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Umum tahunan dan Realisasi Laporan Pengeluaran Belanja Modal tahunan pada BPS Jawa Barat kurun waktu 4 tahun dengan periode tahun 2012-2015.
2. Studi Kepustakaan
   Jonathan Sarwono (2006:26) studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis, seperti studi kepustakaan melalui jurnal, textbook, karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel Dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Apabila dikaitkan dengan judul yang diambil penulis, yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah realisasi laporan keuangan APBD Kabupaten dan Kota Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015.

3.4.2 Penentuan Sampel

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik nonprobabilitas sampling.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh karena penelitian ini mengambil semua anggota populasi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan sampel.

3.4.3 Tempat dan waktu Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik di Jalan PH.H. Mustofa No.43, Cibeunying Kaler, Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Agustus 2016 sampai dengan Februari 2017

3.5 Metode Pengumpulan Data

1) Uji Nomalitas

Menurut Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada penguian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

2) Uji Autokorelasi

Multikolerasi merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat (Gujarati, 2003:351). Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variable independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*,

Dimana Ri² adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel Xi terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas.

3) Uji Multikolineritas

Uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Huse

$$VIF = \frac{1}{1 - R_{\mathrm{i}}^{2}}$$

Untuk menguj oskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkor sing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koe masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2003:406).

4) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak effisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011: 14) menyatakan bahwa analisis deskriptif (kualitatif) adalah :

"Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

Dalam analisis ini dilakukan pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.

2. Analisis Verifikatif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis verifikatif yang meliputi: Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Korelasi, dan Koefisien Determinasi. Alasan menggunakan analisis tersebut karena analisis regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan (memprediksi) besarnya dampak verifikatif yang terjadi dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya (Andi Supangat, 2010:325).

3.6.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Umi Narimawati (2008:5) menjelaskan bahwa analilisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Persamaan analisis regresi linier berganda secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber : Sugiyono (2010:192

3.6.1.2 Analisis Kolerasi Pearson

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel tidak terikat terhadap variabel terikat yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dapat diketahui dengan menggunakan korelasi pearson.

3.6.1.3 Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati(2010:50)

Keterangan:

Kd : Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Dipergunakan oleh Variabel X

R^2 : Kuadrat Koefisien Korelasi

100% : Pengkali yang menyatakan dalam persentase

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara masing-masing Pajak Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) serta Belanja Modal (Y), kita bisa menentukan koefisien determinasi.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah pegujian secara parsial (uji t) dan penyajian secara simultan (uj F).

a. Pengujian Parsial

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t(*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis sacara parsial guna menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabeldependen

Dalam hal ini, variabel independennya yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan variabel dependennya yaitu Belanja Modal. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y (variabel terikat).

Masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : $\beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

. Menghitung Uji t (t-test)

Menurut Sugiyono (2012: 250), mencari :

$$T_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-k-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

r : Korelasi parsial
k : Jumlah variabel independen
n : Jumlah sampel

3.Kriteria Pengambilan Keputusan

a. H0 ditolak jika p-value < 0,05 dan thitung > ttabel
b. H0 diterima jika p-value > 0,05 dan thitung < ttabel

3.6.3 Penepatan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%.

3.6.4 Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan ditentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan ketentuan:

- Jika thitung < ttabel atau thitung > ttabel maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H0 diterima (tidak signifikan)
- Jika –t tabel ≤ thitung ≤ ttabel, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H0 diterima (tidak signifikan).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

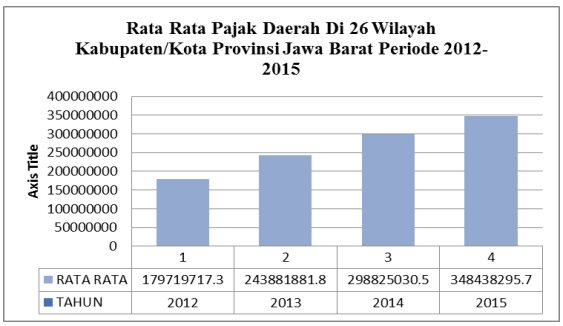
4.1.1.1 Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015

Tabel Perkembangan Pajak Daerah 2012-2015

TAHUN	TERTINGGI (RP)	KABUPATEN DAN KOTA	TERENDAH (RP)	KABUPATEN DAN KOTA	RATA-RATA (RP)
2012	820.563.651,00	KOTA BANDUNG	4.461.590	KOTA BANJAR	179.719.717,3
2013	1.194.087.447,00	KOTA BANDUNG	8.293.779	KOTA BANJAR	243.881.881,8
2014	1.399.598.856,92	KOTA BANDUNG	8.593.830,05	KOTA BANJAR	298.825.030,5
2015	1.494.147.377,05	KOTA BANDUNG	8.679.806,39	KOTA BANJAR	348.438.295,7

Sumber : Data yang Telah Diolah, Tahun 2017

Berikut ini akan saya sajikan dalam bentuk grafik rata-rata Pajak Daerah di 26 wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015 :



Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015

Pada grafik gambar 4.1 terlihat rata-rata Pajak Daerah di 26 wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya. hal itu terlihat dimana pada tahun 2012 rata-rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp.179.719.717,3. di tahun berikutnya yaitu di tahun 2013 rata-rata Pajak Daerah naik menjadi Rp. 243.881.881,8. pada tahun tersebut Kabupaten dan Kota yang memilki

Pajak Daerah tertinggi adalah kota Bandung. hal ini disebabkan karena Kota bandung selain sebagai kota besar dan juga merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat juga dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi baik itu tingkat regional maupun nasional.

Kemudian untuk Pajak Daerah terendah adalah Kota Banjar. hal ini disebebkan karena Kota Banjar selain merupakan kota yang cukup kecil dimana Pajak Daerah yang diterima masih relalif kecil dimana pengembangan kawasan kota nya juga masih relatif belum berkembang untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada. Kemudian di tahun 2013 dan 2014 kembali rata-rata Pajak Daerah naik menjadi masing-masing sebesar Rp.298.825.030,5 dan Rp.348.438.295,7. di tahun tersebut kembali kota Bandung yang memiliki Pajak Daerah terbesar dan kota Banjar dengan Pajak Daerah terkecil.

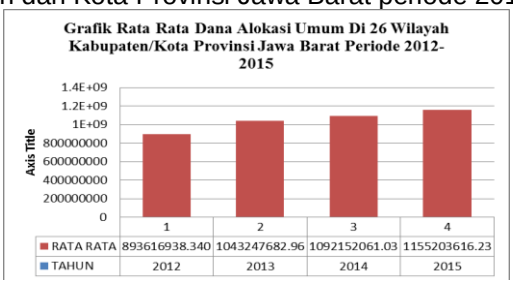
4.1.1.2 Dana Alokasi Umum Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015

Tabel Perkembangan Dana Alokasi Umum 2012-2015

TAHUN	TERTINGGI (Rp)	KABUPATEN DAN KOTA	TERENDAH (Rp)	KABUPATEN DAN KOTA	RATA-RATA (Rp)
2012	1.672.614.142,00	KAB.BOGOR	132.681.042,00	KOTA BANDUNG	893.616.938,35
2013	1.887.770.112,00	KAB.BOGOR	317.122.023,00	KOTA BANJAR	1.043.247.682,96
2014	2.055.944.991,90	KAB.BOGOR	342.267.848,00	KOTA BANJAR	1.092.152.061,04
2015	2.163.439.062,00	KAB.BOGOR	352.697.608,00	KOTA BANJAR	1.155.203.616,23

Sumber : Data yang Telah Diolah, Tahun 2017

Berikut ini akan penulis sajikan dalam bentuk grafik rata-rata Dana Alokasi Umum di 26 wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015:



5

Grafik Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015

Pada grafik gambar 4.2 terlihat rata-rata Dana Alokasi Umum di 26 wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya. hal itu terlihat dimana pada tahun 2012 rata-rata Dana Alokasi Umum sebesar Rp.893.616.938,35. di tahun berikutnya yaitu di tahun 2013 Dana Alokasi Umum daerah naik menjadi Rp.1.043.247.682,96.

Hal ini mencerminkan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat kepada daerah agar daerah bisa terus menggali berbagai potensi yang dimilikinya dalam rangka desentralisasi sebagai wilayah otonom yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan daerahnya dan juga sebagai bantuan atau perimbangan. Karena dana ini memang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian di tahun 2014 dan 2015 kembali rata-rata Dana Alokasi Umum naik masing-masing 4,47% dan 5,45% menjadi masing-masing sebesar Rp.1.092.152.061,04 dan Rp.1.155.203.616,23.

4.1.1.3 Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015

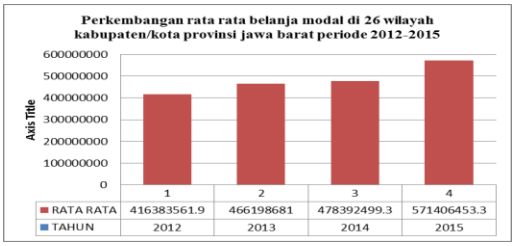
Tabel Perkembangan Belanja Modal 2012-2015

TAHUN	TERTINGGI (Rp)	KABUPATEN DAN KOTA	TERENDAH (Rp)	KABUPATEN DAN KOTA	RATA-RATA (Rp)
2012	1.035.467.434,00	KAB.BOGOR	21.920.947,00	KOTA SUKABUMI	416.383.561,90

2013	1.316.781.706,00	KAB.BOGOR	115.151.805,00	KOTA SUKABUMI	466.198.680,96
2014	1.232.249.682,27	KAB.BOGOR	116.080.255,52	KOTA SUKABUMI	478.392.499,33
2015	1.249.954.669,38	KOTA BANDUNG	166.212.543,93	KOTA SUKABUMI	571.406.453,32

Sumber : Data yang Telah Diolah, Tahun 2017

Berikut ini akan saya sajikan dalam bentuk grafik rata-rata Belanja Modal di 26



wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015:

Grafik Pertumbuhan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015

Pada grafik gambar 4.3 diatas terlihat rata-rata Belanja Modal di 26 wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya. Hal itu terlihat dimana pada tahun 2012 rata-rata Belanja Modal sebesar Rp.416.383.561,9. di tahun berikutnya yaitu di tahun 2013 rata-rata Belanja Modalnya naik menjadi Rp.466.198.681 dengan Belanja Modal terbesar adalah Kabupaten Bogor sebesar Rp.1.316.781.706,00.

Hal ini mengingat Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga Kota Jakarta dan memiliki aktivitas ekonomi yang cukup sibuk sehingga menghasilkan banyak pendapatan dari aktivitas ekonomi nya dan mempunyai masterplan pembangunan yang terintegrasi dengan Kota Kota penyangga lainnya di kawasan tersebut sehingga memilki anggaran yang besar yang bersumber dari banyak pendapatan seperti Pajak Daerah, retribusi daerah, DAK maupun DAU. Kemudian di tahun 2014 dan 2015 kembali rata-rata Belanja Modalnya naik menjadi masing-masing sebesar Rp.478.392.499,33 dan Rp.571.406.453,32 dengan Kabupaten Bogor dan Kota bandung yang memilki Belanja Modal terbesar dan Kota sukabumi dengan Belanja Modal terkecil. Kecilnya Belanja Modal di Kota Sukabumi menjadi ironi mengingat Kota ini sebetulnya memilki potensi yang besar seperti dari sektor pariwisata yang bisa memberikan kontribusi bagi Belanja Modalnya.

4.1.2 Hasil Analisi Verifikatif

4.1.2.1 Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari persamaan regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis

4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Sebelum melangkah ke analisis regresi, terlebih dahulu dihitung koefisien korelasi antar variabel. Koefisien korelasi dihitung untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel, dimana nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut :

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

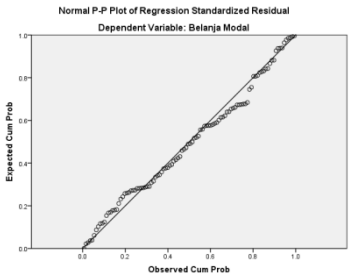
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0000001
	Std. Deviation	1.41150908E8
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.950
Asymp. Sig. (2-tailed)		**.328**

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), yaitu sbesar 0,328 maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada berikut:



Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdisitribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi.Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dapat dilihat dari nilai *tolerance* < 0,10 dan *Variance Inflation Factors* (VIF) > 10 pada model regresi. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

pengujian Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	**.998**	**1.002**
	Dana Alokasi Umum	**.998**	**1.002**

a. Dependent Variable: Belanja Modal

3. Uji Heteroskadastisitas

Jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak mengandungadanya heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011:166).

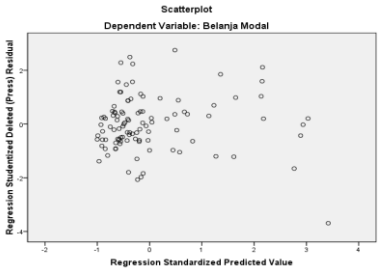
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations

		Belanja Modal	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum
Pearson Correlation	Belanja Modal	1.000	**.854**	**.177**
	Pajak Daerah	.854	1.000	-.041
	Dana Alokasi Umum	.177	-.041	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Modal	.	.000	.036
	Pajak Daerah	.000	.	.341
	Dana Alokasi Umum	.036	.341	.
N	Belanja Modal	104	104	104
	Pajak Daerah	104	104	104
	Dana Alokasi Umum	104	104	104

Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

hal ini berarti data pada setiap variabel bebas memiliki rentangan yang sama.



Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

Grafik *Scatterplot* Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4. Uji Autokorelasi

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Durbin-Watson dan dengan menggunakan bantuan software SPSS.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.880[a]	.774	.770	1.42542E8	.774	173.197	2	101	.000	**1.975**

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,975 sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas=2 dan jumlah pengamatan n=104 diperoleh batas bawah nilai tabel ($d_{L)}$= 1.6415 dan batas atasnya (d_U) = 1.7198. Karena nilai Durbin-Watson model regresi (1,975) berada diatas 1.7198 maka ada keputusan yang dapat diisimpulkan autokorelasi mempengaruhi keputusan pada model regresi.

4.1.2.2 Analisi Regresi Linier Berganda

Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data selama 4 tahun dan di kategorikan menjadi per tahun, pengamatan pada 26 wilayah. Dalam perhitungannya, penulis menggunakan perhitungan komputerisasi yaitu dengan menggunakan media komputer yaitu SPSS v19 *for windows.*

Tabel 4.11
Hasil Estimasi Model Analisis Jalur Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	**1.131E8**	41058290.034		2.755	.007					
	Pajak Daerah	**.711**	.039	.863	18.231	.000	.854	.876	.862	.998	1.002
	Dana Alokasi Umum	**.155**	.034	.212	4.482	.000	.177	.407	.212	.998	1.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

Y= 1.131E8 + 0.711 X1 + 0.155 X2

Dimana :

Y = Belanja Modal

X1 = Pajak Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1.131E8 menunjukkan nilai rata-rata Belanja Modal di 26 kota dan Kabupaten selama periode tahun 2012-2015 jika Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum sama dengan nol.
2. Pajak Daerah memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0.711, artinya setiap peningkatan Pajak Daerah sebanyak 1 satuan diprediksi akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.711, dengan asumsi Pajak Daerah tidak berubah.
3. Dana Alokasi Umum memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0.155, artinya setiap satu satuan penambahan Dana Alokasi Umum diprediksi akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.155, dengan asumsi Dana Alokasi Umum tidak berubah.

4.1.2.3 Analisi Korelasi partial

Correlations

		Belanja Modal	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum
Pearson Correlation	Belanja Modal	1.000	**.854**	.177
	Pajak Daerah	.854	1.000	-.041
	Dana Alokasi Umum	.177	-.041	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Modal	.	.000	.036
	Pajak Daerah	.000	.	.341
	Dana Alokasi Umum	.036	.341	.
N	Belanja Modal	104	104	104
	Pajak Daerah	104	104	104
	Dana Alokasi Umum	104	104	104

1. Korelasi Secara Parsial Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,854 dengan arah positif. Artinya Pajak Daerah memiliki hubungan yang kuat dengan Belanja Modal ketika tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Pajak Daerah meningkat maka Belanja Modal akan meningkat pula. Kemudian besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal ketika Belanja Modal tetap adalah $(0,854)^2$ x 100% = 72,93%.

2. Korelasi Secara Parsial Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal

Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,177 dengan arah positif. Artinya Dana Alokasi Umum memiliki hubungan sangat rendah dengan Belanja Modal. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Modal akan meningkat. Kemudian besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal ketika Belanja Modal tetap adalah $(0,177)^2$ x 100% = 3,13%.

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

Berikut hasil pengaruh secara parsial antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan rumus (*beta x zero order*) :

Tabel 4.14

Tabel Statistik SPSS Koefisien Determinasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.131E8	41058290.034		2.755	.007					
	Pajak Daerah	**.711**	.039	.863	18.231	.000	**.854**	.876	.862	.998	1.002
	Dana Alokasi Umum	**.155**	.034	.212	4.482	.000	**.177**	.407	.212	.998	1.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

1. Variabel Pajak Daerah terhadap Belanja Modal =
   0,711 x 0,854 = 60,71%
2. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal =
   0,155 x 0,177 = 2,74%

Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah variabel X^1 terhadap Y yaitu sebesar 60,71% kemudian diikuti dengan Pengaruh X^2 terhadap Y yaitu sebesar 2,74%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial uji T

Statistik SPSS (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.131E8	41058290.034		2.755	.007					
	Pajak Daerah	.711	.039	.863	**18.231**	.000	.854	.876	.862	.998	1.002
	Dana Alokasi Umum	.155	.034	.212	4.482	.000	.177	.407	.212	.998	1.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output *SPSS v*19 Tahun 2017

Sebelumnya harus dicari terlebih dahulu nilai t_{tabel} karena akan dibandingkan dengan nilai t_{hitung}. T_{tabel} diperoleh dari: Tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,05, dimana tabel distribusi t dengan uji dua pihak .α/2= 0,05/2 = 0,025 dan db = n-k-1 = 104-2-1 = 101. Maka t adalah 1.983.

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan keluaran *software* SPSS seperti terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} variabel X^1 sebesar 1,010 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t_{tabel} t_{hitung} 18.231 > 1.983 maka diputuskan untuk menerima H_1 sehingga H_0 ditolak. Jadi berdasarkan penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan keluaran *software* SPSS seperti terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} variabel Dana Alokasi Umum sebesar 4,482 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t_{hitung} 4,482 > t_{tabel} 1,983 maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima. Jadi

berdasarkan penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal sebesar 0,854 yang bernilai positif. Artinya Pajak Daerah mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan Belanja Modal. Jadi jika Pajak Daerah meningkat maka Belanja Modal pun ikut meningkat

Terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 60,71%, artinya Pajak Daerah memberikan pengaruh sebesar 60,71% terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dan sisanya sebesar 39,29% Selanjutnya hasil pengujian hipotesis (uji-t) menunjukan nilai t_{hitung} jatuh didaerah penolakan Ho (t_{hitung} 18,231 > t_{tabel} 1,983) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1, artinya berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikan dapat dilihat bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha dan A.A.N.B Dwiranda, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan (R.Budi Hendaris dan Handiyaningrum Tjatur Rahayu, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila Pajak Daerah mengalami kenaikan maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal sebesar 0,177 yang bernilai positif. Artinya Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan sangat rendah dan positif dengan Belanja Modal. Jadi jika Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Modal pun ikut meningkat. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Jadi, semakin besar Dana Alokasi Umum yang dikeluarkan maka semakin besar juga Belanja Modal yang dikeluarkan. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar 2,74%, artinya Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh sebesar 97,26% terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dan sisanya sebesar 97,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti yaitu seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan dan lain-lain

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis (uji-t) menunjukan nilai t_{hitung} jatuh didaerah penolakan Ho (t_{hitung} 4,482 > t_{tabel} 1,983) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1, artinya berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikan dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Agus Budi Santosa, 2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan (Yudi Satrya Aprizay, dkk, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap Belanja Modal, dimana setiap kenaikan Pajak Daerah maka akan menaikan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2012-2015.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima, maka semakin tinggi Belanja Modal yang diterima.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. PEMDA/PEMKOT 26 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus bisa mensosialisasikan lagi mengenai kesadaran akan membayar pajak agar pendapatan daerah yang berasal dari pajak tersebut dapat lebih efektif dalam digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahtraan rakyat.
2. Untuk meningkatan Dana Alokasi Umum pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dan pemerintah pusat sebaiknya memperhatikan lebih serius daerah-daerah yang pendapatannya masih rendah, sehingga daerah tersebut mendapat transfer Dana Alokasi Umum dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Dalam penelitian ini hanya mengambil dua variabel independen, sehingga belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi Belanja Modal. Oleh karena itu, perlu ditambah variabel yang mempengaruhi belanja modal seperti retribusi daerah, dana alokasi khusus, dana perimbangan dan lain-lain.
2. Bagi Peneliti Lain
   Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian berikutnya dengan metode yang sama tetapi dengan variable, unit analis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

Daftar Pustaka

Abdul Halim.2007. Pengelolaan Keuangan Daerah.Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Abdul Halim & Syam Kusufi.2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Agus Budi Santosa. 2013. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten/kota.* Universitas Stikubank. Semarang

Andi Supangat.2010. Statistika: *Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*: Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Budi, Purnomo S. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Boediono, 2010. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta, KPG (Keputakaaan Populer Gramedia)

Darwanto. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.

Gujarati. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi SektorPublik: Akuntansi Keuanga Daerah.* Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdulah. Dkk, 2012. Akuntansi *Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.

Hendaris Budi R dan Rahayu Tjatur Handiyaningrum. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal.*

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima).* Semarang: Universitas Diponegoro

I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha dan A.A.N.B Dwirandra. 2016. *Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH Pada Belanja Modal.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2303-1018 Vol.14.

Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Luh Putu Rani Mayasari. 2014. *Pengaruh pertumuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabipaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Gahesha.Singaraja

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Mohammad Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ni Luh Dina Selvia Martini.dkk. 2014. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten buleleng tahun 2006-2012*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

Nordiawan, Deddi.*Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat. Jakarta.2008

Nordiawan,dkk. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2.Jakarta : Selemba Empat.

Nordiawan, Deddi.*Akuntansi Sektor Publik. 2012*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/05/14/234780/realisasi-belanja-modal-pemprov-jabar-dinilai-masih-sangat-kecil

Riko Novianto. 2015. *Pengaruh pendapatan asli, dana perimbangan dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.* Jurnal ekonomi. ISSN: 2302-7169 Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2015

Saragih. 2006. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Selemba Empat

Sarwoko. 2005. Metedologi Penelitian. Jogjakarta: Pustaka Belajar

Sheila Ardhian nuarisa.2013. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*. Universitas Negeri Semarang

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Situngkir, anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemka Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Stepvani Uhise. 2013. *Dana alokasi umum pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening.* Universitas Sam Ratulangi Manado

Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah).* Jakarta : PT Gramedia Widiasaranan, 2011

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-14

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Yogyakarta: ANDI

Syaiful. 2010. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. http://file.upi.edu/Direktori/ L%20%20FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121%20-%20IKIN% 20SOLIKIN/Jurnal%20PAD.pdf.01;06 pm, Tanggal 2 Nov 2010

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Yudi Satrya Aprizay.dkk. 2014. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimabangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi aceh*. Universitas Syiah Kuala.Aceh